



Mahasiswa Nommensen Demo KPU Sumut

Medan, MIMBAR - Di bawah guyuran hujan deras, ratusan massa mahasiswa dari Fakultas Hukum (FH) Universitas HKBP Nommensen Medan menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Kamis (29/2/2024) sore.



Massa mahasiswa mengkritisi terkait Pemilu 2024 yang prihatin terhadap kondisi demokrasi Indonesia. Berbagai atribut aksi juga dibawa oleh massa mahasiswa seperti poster dan bendera merah putih.



Kami bukan 01, 02, atau 03. Melainkan kami Indonesia."

Sejumlah dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disampaikan massa mahasiswa antara lain, pengerahan pejabat desa untuk mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres lewat deklarasi desa bersatu yang digelar 17 Desember 2023 lalu.

Kemudian, Remaja di Sampang diduga coblos surat suara di luar TPS, dilakukan secara berkelompok, dugaan kecurangan di Malaysia, KPU ungkap ada 1.972 surat suara dicoblos.

■ Bersambung ke Hal 11



Jokowi Pecat Senator Bali Penista Agama

Jakarta, MIMBAR - Senator asal Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna atau AWK resmi dipecat dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Joko Widodo.

Pemecatan tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 35/P Tahun 2024 tentang peresmian pemberhentian antar waktu anggota DPD dan

■ Bersambung ke Hal 11

Soal Penambahan DPT 7 PPLN Kuala Lumpur Ditetapkan Tersangka

Jakarta, MIMBAR - Bareskrim Polri menetapkan tujuh orang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka kasus dugaan penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) kemarin.

■ Bersambung ke Hal 11



90 Pegawai Terlibat Pungli Rutan KPK Terancam Pecat

Jakarta, MIMBAR - Bukan hanya diberikan sanksi minta maaf, 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat kasus pungutan liar (pungli) di Rutan bisa juga dipecat melalui sanksi disiplin oleh Inspektorat KPK.

Hal itu disampaikan Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri merespon pertanyaan publik yang merasa heran karena sebanyak 78 pegawai hanya dijatuhkan sanksi etik berat berupa permintaan maaf secara terbuka dan langsung oleh Dewan Pengawas (Dewas).

"Putusan kedua, merekomendasikan agar dijatuhkan sanksi disiplin oleh Inspektorat KPK. Inilah wilayah administratif nanti. Jadi sanksi permintaan maaf

langsung secara terbuka itu baru satu, yang sudah dilakukan oleh Dewas KPK," kata Ali kepada wartawan, Kamis (29/2).

"Eksekusi telah dilaksanakan pada Senin Kemarin. Yang kedua, pemeriksaan disiplinnya itu oleh inspektorat. Nah disiplin ini hukuman terberatnya adalah pemecatan," sambungnya.

■ Bersambung ke Hal 11



■ Bersambung ke Hal 11



MK Larang Jaksa Agung dari Partai Politik

Jakarta, MIMBAR - Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pengurus partai politik menjadi jaksa agung. Hal itu disampaikan dalam putusan atas gugatan terhadap Undang-undang Kejaksaan. MK mengubah ketentuan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Mahkamah menambahkan syarat tentang afiliasi terhadap partai politik.

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

20 SYA'BAN 1445 H

Subuh : 05:21 WIB	Maghrib : 18:42 WIB
Zuhur : 12:41 WIB	Isya : 19:51 WIB
Ashar : 15:57 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Harus Jujur

Oleh Dr A Rasyid, MA

KEJUJURAN adalah paling utama dalam kepemimpinan. Jika tidak, maka akan rusaklah apa yang dipimpinya. Sebab itu kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada yang tidak memiliki sifat jujur.

Jujur secara umum adalah sebuah aspek ciri dan moral manusia yang berbudi luhur dimana seseorang dengan karakter ini kemudian akan memiliki integritas, adil, setia, tulus, dan dapat dipercaya oleh orang lain.

Secara umum, jujur adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Itu artinya, seseorang kemudian dapat dikatakan jujur jika ia mengucapakan sesuatu yang

■ Bersambung ke Hal 11



Menyimpan Janji Menteri AHY

Bela Rakyat Kecil dari Mafia Tanah

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku bakal memberantas habis mafia tanah di Indonesia. Ia menyebut akan membela rakyat kecil yang menjadi korban dan tak segan melawan para mafia tanah.

"Kita pastikan kalau ada masyarakat apalagi masyarakat kecil yang dizalimi, yang akhirnya dibikin susah oleh para mafia tanah, ini

kita akan bela habis dan tentunya kita akan berantas mafia tanah ini, kita harus tegas," kata AHY mengutip siaran pers, Kamis (29/2).

AHY berharap Kementerian ATR/BPN bisa memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah ke masyarakat luas.

Menurutnya hal itu bisa dicapai salah satunya lewat penyerahan sertifikat tanah yang membuat masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya.

■ Bersambung ke Hal 11

Israel Tembaki Ribuan Pengantre Makanan di Gaza

Gaza, MIMBAR - Tank dan artileri pasukan penjajah Israel (IDF) dilaporkan menembaki ribuan warga Gaza yang tengah mengantre bantuan pangan di tengah kelaparan di Gaza, Kamis (29/2). Sedikitnya 70 warga sipil syahid dan puluhan lainnya terluka saat menunggu bantuan makanan di Jalan Al-Rashid barat daya Kota Gaza.

Kantor Berita Wafa melansir, sumber medis mengatakan bahwa

■ Bersambung ke Hal 11



■ Curang di sana sini ...
■ Hehehe..

Jokowi Pecat...

Dari Halaman 1

anggota majelis permusyawaratan rakyat masa jabatan 2019-2024.

Kepala Kantor Sekretariat Jenderal DPD Provinsi Bali, Putu Rio Rahdiana mengatakan, Keppres pemecatan AWK masih belum diterima. Namun ia sudah melihat surat Keppres Jokowi beredar.

"Kemarin kan sudah ada putus dari BK (Badan Kehormatan DPD). Jadi keputusan BK itu masih menunggu adanya putusan presiden. (Kalau ada) keppres, saya juga belum menerima keppres-nya secara resmi. Tapi, saya sudah lihat ada pemberitaan yang mencantumkan screenshot keppres tersebut. Jadi kalau secara resmi kita belum menerima," kata dia saat dihubungi, Kamis (29/2).

Namun, menurutnya jika Keppres Jokowi sudah diterbitkan, akan ada sidang paripurna oleh DPD RI untuk menyampaikan secara resmi keppres tersebut.

"Jadi nanti kalaupun keppres itu sudah terbit, nanti akan ada sidang paripurna yang membacakan dan menyampaikan keppres tersebut. Ada penyampaian resmi dari lembaga (DPD RI)," jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa sidang paripurna akan dilaksanakan awal Maret 2024.

"Awal Maret 2024 sidang paripurna. Iya seharusnya kalau memang bener keppres sudah ada, harusnya tidak ditunda-tunda lagi penyampaiannya itu," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan nasib AWK sebagai anggota DPD usai Keppres pemecatan bersifat final.

"Kalau keppres (terbit) itu sudah keputusan tertinggi jadi sudah final. Tapi tidak menutup kemungkinan ada upaya-upaya hukum di situ. Misalnya, beliau (AWK) mau menggugat atau apa," ujarnya.

CNNIndonesia.com menghubungi Arya Wedakarna terkait Keppres pemecatan dari Jokowi. Namun hingga berita

ini diturunkan yang bersangkutan masih belum menanggapi.

Surat Keppres tersebut ditetapkan Jokowi pada Kamis (22/2) dan telah ditandatangani Kementerian Sekretariat Negara Deputi Bidang Administrasi Aparatur Nanik Purwanti.

"Meresmikan pemberhentian Dr. Shri. I.G.N Arya Wedakarna MWS, S.E. (M.TRU), M.Si sebagai anggota dewan perwakilan daerah dari daerah pemilihan Provinsi Bali dan sebagai anggota majelis permusyawaratan rakyat masa jabatan Tahun 2019-2024," tulisnya, dikutip dari Keppres tersebut.

Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI resmi memberhentikan anggota DPD RI Dapil Bali, Arya Wedakarna alias AWK. Pemberhentian tersebut berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik terkait ucapan bernada diskriminasi.

Wakil Ketua BK DPD RI Made Mangku Pastika mengatakan, pemberhentian Arya berdasarkan Pasal 48, ayat 1 dan 2 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2021 Badan Kehormatan DPD RI.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali resmi melaporkan Anggota DPD RI asal Bali Arya Wedakarna terkait dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri.

Dalam laporannya, Arya diduga melanggar pasal 45A ayat 2 UU RI Nomor 19 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan/atau pasal 156 KUHP dan pasal 156a ayat 1 KUHP tentang peristiwa tindak pidana SARA dan penistaan agama.

Sebelumnya beredar video Arya Wedakarna melontarkan kata-kata yang dianggap diskriminatif. Dalam video itu Arya meminta agar para frontliner di Bali tidak menggunakan penutup apapun seperti yang dilakukan di negara-negara Timur Tengah. (cnni/js)

Dari Halaman 1

7 PPLN...

"Jumlah tersangka yang telah ditetapkan tujuh orang dari PPLN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/2).

Djuhandani menjelaskan tindak pidana pelanggaran pemilu berupa penambahan data pemilih itu diduga dilakukan oleh ketujuh anggota PPLN antara periode 21 Juni 2023 sampai sekarang.

Ia merincikan enam anggota PPLN tersebut dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 544 Jo Pasal 545 tentang Penambahan atau Pengurangan DPT setelah Ditetapan serta Pemalsuan Data DPT.

"Satu orang ditingkatkan status sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemilu dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," tuturnya.

Saat ini penyidik tengah melengkapi berkas perkara milik ketujuh tersangka itu sebelum akan dilimpahkan ke Kejaksaan. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," pungkasnya.

Ketua Komisi Pemilihan

Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari sebelumnya mengungkapkan keanehan dalam proses pemungutan suara Pemilu 2024 metode pos di sekitar Kuala Lumpur, Malaysia.

Keanehan terjadi di dua tempat di Puchong, Selangor, Malaysia. Hasyim menyebut kantor pos di Puchong menerima karung berisi surat suara dari pemilih.

Padahal, kata dia, kantor pos seharusnya menerima surat suara perorangan. Sebab, surat-surat suara itu dikirim oleh kantor pos ke alamat masing-masing pemilih yang tertera di amplopnya.

Keanehan lainnya ketika ada seseorang memakai seragam pos Malaysia, mengantar karung pos Malaysia yang isinya juga surat suara. Hasyim menyebut KPU menemukan ada beberapa surat suara yang sudah dicoblos.

"Sebagian itu sudah dicoblos. Sebagian masih utuh, artinya masih dalam amplop yang alamatnya masih alamat nama pemilih dan alamat pemilih itu," ujarnya.

"Ini kan keanehan-keanehan dan anomali, kenapa surat suara dalam karung pos Malaysia bisa di luar dan digepeng di dalam penguasaan pihak yang tidak berwenang?" lanjutnya. (cnni/js)



Harus Jujur

Dari Halaman 1

sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dan disertai dengan tindakan yang seharusnya.

Pemilu yang baru saja kita gelar di negeri ini mndapat banyak ocehan dari kalangan masyarakat, sebab banyak fakta ditemukan kecurangan. Ini menandakan bahwa Pemilu kita tidak berjalan dengan baik semua motto jujur dan adil (Jurdil).

Sangat kita sayangkan jika Pemilu tidak berjalan dengan Jurdil sebab akan melahirkan pemimpin yang juga tidak akan bisa dipercaya memiliki sifat jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. Karena itu nantinya dikawatirkan akan melakukan berbagai tindak kecejahtan terhadap rakyatnya sendiri.

Sikap masyarakat yang begitu proaktif mempersoalkan temuan-temuan kecuranghan adalah dalam rangka mengupayakan lahir pemimpin yang jujur dan memiliki niat baik untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik dari kondisi yang kita hadapi selama ini.

Mustahil rasanya bila pemimpin itu lahir dari tipu-tipu akan bisa bekerja penuh ikhlas dalam membangun negeri ini menjadi lebih baik. Jika caranya saja sudah salah meraih jabatan, maka dapat dipastikan apapun yang dia lakukan selama memimpin tidak akan mendapat ridha Allah SWT.

Sifat jujur dalam diri seorang adalah sangat utama dalam ajaran, sebagaimana hadis Nabi yang artinya; Artinya: "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur." (HR Bukhari).

Semoga saja Pemilu yang kita jalani ini akan melahirkan hasil dari sebuah kejujuran, sehingga kelak kita dipimpin sosok yang jujur, bukan hasil ciptaan tipu-tipu yang akhirnya nanti rakyat senantiasa menjadi korban penipuan. **

MK Larang...

Dari Halaman 1

agung,'" kata ketua majelis hakim MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2).

Dalam pertimbangan, MK berpendapat pengurus partai politik adalah orang yang memilih mendekati diri lebih dalam ke partai politik. Dengan demikian, MK mengubah aturan dengan maksud mencegah konflik kepentingan.

Anggota majelis hakim MK Saldi Isra menjelaskan syarat mundur dari partai lima tahun ditujukan untuk memutus ikatan batin terhadap partai politik. Aturan itu diharapkan mencegah mantan pengurus parpol tetap berafiliasi dengan partai politik setelah ditunjuk sebagai jaksa agung.

Sementara itu, MK tidak memberi batasan waktu bagi kader biasa di partai politik yang ditunjuk sebagai jaksa agung. Hal itu karena MK menilai kader biasa tidak punya keterikatan yang kuat kepada partai politik.

"Bagi calon jaksa agung yang belum diangkat menjadi jaksa agung merupakan kader partai politik, cukup melakukan pengunduran diri sejak dirinya diangkat menjadi jaksa agung," ucap Saldi.

Ketetapan ini merupakan putusan atas perkara nomor 6/PUU-XXII/2024. Perkara ini adalah permohonan dari aktivis antikorupsi Jovi Andrea Bachtiar.(cnni/js)

Mahasiswa Nommensen...

Dari Halaman 1

rah dalam mengontrol sesuai tupoksinya masing-masing sehingga bisa terjadi dugaan kecurangan dan tidak bertindak tegas atas dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi secara terang-terangan," pungkhas massa.

PRIHATIN

Koordinator aksi, Andro Siahaan mengatakan, para mahasiswa khususnya FH HKBP Nommensen sangat prihatin terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. "Ada yang mengatakan Pemilu tahun ini bersih, bodoh kali lah kami mahasiswa ini bisa dibodoh-bodohi. Katanya bersih pemilu 2024, sementara ada seorang saksi Paslon di Tapteng kena keroyok, demokrasi-kah itu!" tegasnya.

Andro juga menyatakan kalau mahasiswa yang menjadi kontrol sosial di lingkungan masyarakat mendesak dugaan kecurangan selama Pemilu 2024 diusut tuntas.

"Apabila dibiarkan, kecurangan bakal menjadi

panduan dan seolah dinormalisasi saat pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional 2024," sebut massa mahasiswa.

Selain itu, lanjutnya, sentimen negatif yang muncul akibat dugaan kecurangan juga meningkatkan ketegangan sosial.

"Di sini kita juga bisa menyimpulkan ketidaksiapan KPU dan Bawaslu baik pusat maupun daerah dalam mengontrol sesuai tupoksinya masing-masing sehingga bisa terjadi dugaan kecurangan dan tidak bertindak tegas atas dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi secara terang-terangan," tuturnya.

Sementara, menanggapi aksi demo tersebut, pihak KPU Sumut mendatangi massa mahasiswa untuk memberikan penjelasan.

Usai mendapat penjelasan dari pihak KPU Sumut, massa mahasiswa pun membubarkan diri secara teratur dengan pengawalan petugas kepolisian. (A-08/A-10)

90 Pegawai...

Dari Halaman 1

Proses kedua sedang berjalan sampai hari ini yaitu pemeriksaan di Inspektorat. Sudah beberapa orang dipanggil, diperiksa oleh pihak Inspektorat. Nanti pasti akan dilakukan pemeriksaan terhadap semuanya," pungkhas Ali.

Pada Kamis (15/2), Dewas KPK telah membacakan putusan sidang etik terhadap 90 orang terperiksa. Dari 90 orang terperiksa itu, Dewas KPK sudah menjatuhkan sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka dan langsung terhadap 78 orang pegawai Rutan KPK.

Sedangkan 12 orang lainnya yang menerima uang pungli sebelum adanya Dewas KPK, diseraikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk dilakukan sidang disiplin.

Para terperiksa tersebut terbukti menerima uang bulanan dari para tahanan KPK agar bisa memasukan handphone, barang/makanan, dan lainnya ke dalam tahanan sejak 2018-2023. Uang yang diterima paling sedikit sebesar Rp2 juta, dan paling banyak sebesar Rp425,5 juta.

Ali memastikan, KPK bisa melakukan pemecatan terhadap pegawai KPK melalui sanksi disiplin. Termasuk jika pegawai yang terlibat pungli di Rutan KPK juga bisa dipecat.

"Di beberapa contoh misalnya, beberapa bulan yang lalu, KPK telah memecat dua orang pegawai. Dua orang oknum dihukum dari sisi etiknya oleh Dewan Pengawas KPK Dengan hukuman yang berat. Kemudian disiplinnya dipecat melalui Inspektorat sudah dilaksanakan, dan saat ini melalui proses pengekangan hukum oleh Kedepuitan Penindakan," terang Ali.

Bukan hanya itu, kata Ali, KPK juga memproses ke ranah pidana terhadap kasus pungli tersebut. Di mana, KPK sudah menetapkan lebih dari 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pungli di Rutan KPK.

"Oleh karena itu untuk kasus pungli di Rutan ini, baru jenis hukuman satu dari Dewas KPK.

Israel Tembaki...



keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya," sementara PBB memperingatkan bahwa 2,2 juta orang berada di ambang kelaparan.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mengatakan bahwa warga Gaza menderita kerawanan pangan dan kelaparan akut yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kondisi di Gaza menyerupai kelaparan.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa sekitar 2,2 juta warga Gaza termasuk dalam salah satu dari tiga tingkat kelaparan, yang berkisar dari keadaan darurat, krisis, hingga bencana. Ini adalah kondisi yang belum pernah disaksikan FAO sebelumnya di negara manapun di dunia.

TEMBUS 30 RIBU TEWAS

Korban tewas di Jalur Gaza terus meningkat dan diperkirakan sudah melebihi 30.000 orang.

Hal itu diungkap oleh Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat AFP pada Kamis (29/2).

Korban tewas terbaru di Jalur Gaza mencapai 79 orang, mereka dinyatakan meninggal dunia hanya dalam semalam.

Selain karena serangan bom Israel, banyak warga Palestina yang tewas karena bencana kelaparan yang semakin meluas.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf al-Qudra mendesak organisasi internasional segera bergerak untuk mengatasi masalah ini.

Bela Rakyat...

Dari Halaman 1

"Kalau ada investor yang ingin datang ke Indonesia kalau mereka tahu tersedia lahan yang clean and clear. Termasuk juga punya kepastian hukum tadi, maka mereka bisa dengan nyaman menanam uang dan modalnya di sini dan ekonomi akan bergerak," ucap dia.

AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN pada Rabu (21/2) lalu. Ia menggantikan Hadi Tjahjanto yang bersamaan juga dilantik menjadi Menko Polhukam.

Satu pekan setelah dilantik, AHY untuk pertama kalinya berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menyanjung proyek besar tersebut.

"Anak-anak meninggal karena kekurangan gizi, dehidrasi dan kelaparan yang meluas di rumah sakit Al-Shifa Kota Gaza," ujarnya.

Kepala USAID Samantha Power mengatakan Israel perlu membuka lebih banyak penyeberangan sehingga bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan dapat meningkat secara signifikan.

"Ini adalah masalah hidup dan mati," kata Power dalam sebuah video yang diposting di platform media sosial X.

Menurut Program Pangan Dunia (WFP), kota Rafah yang merupakan pintu masuk utama bantuan dari Mesir sudah tidak beroperasi selama sebulan dan menuduh Israel memblokir akses.

"Jika tidak ada perubahan, kelaparan akan segera terjadi di Gaza utara," kata wakil direktur eksekutif WFP Carl Skau.

Para pejabat Israel membantah memblokir pasokan, dan tentara pada hari Rabu mengatakan 50 truk yang membawa bantuan kemanusiaan telah sampai ke Gaza utara dalam beberapa hari terakhir.

Perang dipicu oleh serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel selatan yang mengakibatkan kematian sekitar 1.160 orang. Hamas juga menyandera sekitar 250 orang, 130 di antaranya masih berada di Gaza, termasuk 31 orang diperkirakan tewas. Kampanye militer balasan Israel di Gaza telah menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi, dan hampir 1,5 juta orang kini memadati Rafah. (rep/rm/js)

AHY terpukau seraya menyebut IKN sebagai mimpi besar Presiden Jokowi dalam membangun pusat pemerintahan baru sekaligus pusat kemajuan bangsa di masa depan.

"Kesan pertamanya saya terpukau dengan apa yang menjadi mimpi besar Presiden Jokowi dan kita semua, untuk menghadirkan sebuah pusat pemerintahan yang juga ke depannya menjadi pusat kemajuan bangsa," kata AHY di IKN, Kaltim, Rabu (28/2).

Dalam kunjungannya ke Kaltim, ia juga membagikan sertifikat tanah hasil dari program pendaf-taran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Samarinda. (cnni/js)